



Judul : Di daerah lain ada gunung pasir, di Bekasi adanya gunung sampah
Tanggal : Minggu, 03 Juli 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Di Daerah Lain Ada Gunung Pasir Di Bekasi, Adanya Gunung Sampah

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Intan Fauzi menyoro-roti sistem pengelolaan sampah di daerah penyangga DKI Jakarta, utamanya Bekasi dan Depok. Sampah yang mengunung di dua daerah itu seperti kekayaan gunung batu bara yang ada di daerah lain.

"Buat saya sampah di Kota Depok dan Bekasi tidak asing lagi apalagi Sumur Batu (tempat pembuangan sampah Kota Bekasi). Kalau di daerah lain punya gunung pasir, batu bara, atau apa, di Bekasi ada gunung sampah dan sampahnya menurut saya sudah diluar dari yang harus ada," kata Intan di Jakarta, kemarin.

Intan menilai, persoalan sampah ini pula yang membuat kawasan Sumur Batu dan sekitarnya sudah sangat tidak ideal untuk menjadi kawasan pemukiman, perkantoran bahkan rumah sakit. Ada usulan rumah susun bagi warga tidak mampu di sekitar kawasan Sumur Batu namun batal karena tidak memenuhi faktor kesehatan untuk sebuah pemukiman. "Tentu ini merugikan warga Bekasi," katanya.

Tidak hanya itu, mobil-mobil pengangkut sampah dari DKI Jakarta ini memperparah kenyamanan dan kesehatan lingkungan di Kota Bekasi. Saat truk sampah melewati menuju tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang, baunya menyebar ke mana-mana. Belum lagi, persoalan banjir yang ternyata penyebab utamanya penyumbatan aliran sungai akibat sampah.

"Sehingga ini perlu penanganan komprehensif oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Depok. Bukan hanya beban di Dinas Lingkungan Hidup," ujar politisi Fraksi PAN ini.

Dia berkeyakinan, Pemkot Bekasi dan Depok mampu mengatasi persoalan gunung sampah ini. Salah satunya melalui penerapan pembuangan sampah untuk energi listrik (PSEL).

zona buang dan Refused Derived Fuel (RDF) yang sudah dikerjakan-samakan dengan BUMN.

Dia berharap, melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi dan ramah lingkungan, sampah dapat dikelola menjadi dengan baik seperti di Tokyo Jepang. Di mana ada bangunan tinggi yang memang dikhususkan untuk pengumpulan sampah.

"Sampah satu kota dikumpulkan di satu tempat, tidak ada bau. Bentuknya seperti perkantoran dan lingkungannya bisa tetap dibangun jadi areal pemukiman dan perkantoran karena sudah diolah sedemikian rupa," jelasnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum dan Perencanaan Kota Bekasi Dwie Andriyani Dian Arga menuturkan, sejatinya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah diimplementasikan di Kota Bekasi. Berbagai peraturan turunan seperti peraturan walikota, peraturan daerah pun sudah dibuat untuk mengatasi sampah di wilayah pinggiran Jakarta ini termasuk pengelolaan bank sampah.

Dwie menjelaskan, pada 2019 kota Bekasi mempunyai satu bank sampah induk dan 137 bank sampah aktif. Namun sayangnya di 2022 terjadi penurunan aktivitas karena pandemi sehingga bank sampah yang aktif tinggal 170. "Namun jumlah tersebut akan bertambah seiring sosialisasi dan pelatihan yang diberikan pemerintah kota Bekasi," katanya.

Diakuinya, ada beberapa kendala dalam pengelolaan sampah di Bekasi. Di antaranya, kurangnya sumber daya manusia mengelola sampah baik kualitatif maupun kuantitatif. Anggaran untuk pengelolaan sampah yang masih perlu ditingkatkan. Dan keterbatasan lahan di zona buang TPA Sumur Batu sehingga tidak dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan 2,5 juta masyarakat Bekasi. ■ KAL